BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Proses mediasi yang diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan adalah mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana.
2. Terdapat beberapa hambatan jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya yaitu para pihak tidak mau bersepakat (bermusyawarah), para penegak hukum masih berpandangan dualisme,

kedua belah pihak malas melakukan mediasi dan banyak melakukan tuntutan sehingga peranan mediator sangat penting dalam proses mediasi yaitu mempertemukan kedua belah pihak supaya terjadi perdamaian. Optimalisasi jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya karena Penanganan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya penerapan mediasi dapat diterapkan dalam kasus-kasus pidana yang bersifat ringan karena praktek mediasi dalam pidana sudah dijalankan, tetapi kenyataannya dalam hukum pidana tidak mengatur.
2. Perlu dibangun lembaga mediasi perkara pidana sebagai pendukung pelaksanaan mediasi, agar pencapaian tujuan hukum dapat diwujudkan baik keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

Allan J. Stit., 2004. *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish).

Bambang Sutiyoso, 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007 *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

CSA Teddy Lesmana, *Mediasi Penal, Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*.

Hans Loo, 2007 *From Negotiation to Mediation*, (New York : Confluenc.

Kriteria yang digunakan untuk melakukan pengelompokan perkara yang seharusnya diputus oleh Pengadilan Acara Cepat antara lain adalah berdasarkan nilai gugatan. Oleh karena itu, di beberapa negara yang menerapkannya seperti Amerika Serikat menyebutnya sebagai *Small Claim Court* atau di Jepang disebut sebagai *Summary Court*. Peradilan Acara Cepat juga menangani perkara pidana kejahatan atau pelanggaran dengan hukuman denda.

Nurnaningsih amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, raja grafindo persada, Jakarta.

Ronald S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A, 2006, *Peace skills, panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Simon A. Robert dan Michael Palmer *From Negotiation to Mediation*, (New York : Confluence.

Syahrizal Abbas, 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988 (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, 1988 (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 2012 tentang
penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Internet:

<http://matabku.blogspot.com/2009/09/teori-hukum-pidana.html> 1 Desember 2012

<http://pn-kepanjen.go.id> 5 Oktober 2012

<http://kamusbahasaindonesia.org> 5 Oktober 2012

<http://www.hukumonline.com> 6 Oktober 2012

<http://www.hukumonline.com> 18 Mei 2012

Blue print Mahkamah Agung 2010-2035 2 Desember 2012

<http://www.jambilawclub.com> 13 Juli 2013

<http://www.nysdra.org> 13 Juli 2013

<http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>, 14 Juli 2013

<http://sekolahparalegal.blogspot.com>, 14 Juli 2013

[Mediator –anggoro.blogspot.com./2012/01/mediasi-penal-penyelesaian-perkara.html](http://anggoro.blogspot.com/2012/01/mediasi-penal-penyelesaian-perkara.html), 14 Juli 2013

Masriadam.blogspot.com./2013/02/hukum-progresif.html, 14 Juli 2013

Media Massa:

Kedaulatan rakyat, 12 Desember 2012